



The Effectiveness of the Implementation of
Local Government Information Systems in
Efforts to Support Financial Administration in
Buleleng Regency Government

Luh Sri Mendriadi and Ida Ayu Putu Sri Widnyani

EasyChair preprints are intended for rapid
dissemination of research results and are
integrated with the rest of EasyChair.

August 17, 2023

Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam Upaya Mendukung Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng

Luh Sri Mendriadi^{1, a)} dan Ida Ayu Putu Sri Widnyani, S.Sos., MAP^{2, b)}

¹Universitas Ngurah Rai Denpasar, Bali, Indonesia

² Universitas Ngurah Rai Denpasar, Bali, Indonesia

Email Penulis

^{a)} Penulis yang sesuai: srimendriadi9@gmail.com

^{b)} dayusriwid@unr.ac.id

Abstrak. Pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan sudah diharuskan untuk menggunakan SIPD untuk mendapatkan informasi keuangan daerah yang efektif, efisien, akurat dan akuntabel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Efektivitas penerapan SIPD dalam upaya mendukung penatausahaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Buleleng, dilihat dari: a) indikator pendekatan sumber adalah belum efektif, b) dilihat dari indikator pendekatan proses adalah sudah efektif, dan c) dilihat dari indikator pendekatan sasaran adalah sudah efektif, 2) Hambatan-hambatan penerapan SIPD dalam upaya mendukung penatausahaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Buleleng dilihat dari: a) indikator pendekatan sumber adalah kurang pemahaman sumberdaya manusia utamanya dalam menerapkan alur bisnis dari laporan penatausahaan keuangan, b) dilihat dari indikator pendekatan proses adalah jaringan internet yang kurang baik, dan c) dilihat dari indikator pendekatan sasaran adalah belum lengkapnya fitur-fitur pada aplikasi SIPD, dan 3) Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan saat penerapan SIPD, dilihat dari: a) indikator pendekatan sumber adalah dengan memberikan pembinaan dan bimbingan teknis, sehingga SDM itu memiliki pemahaman yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan, b) indikator pendekatan proses adalah berkoordinasi dengan Kemendagri, agar bisa menjawab masalah-masalah yang dihadapi dalam penatausahaan keuangan, dan c) indikator pendekatan sasaran adalah dengan memberikan masukan kepada Kemendagri untuk menambah fitur-fitur baru yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penatausahaan.

PENDAHULUAN

Era globalisasi ini pentingnya sistem informasi manajemen dalam menghadapi perkembangan pengetahuan teknologi yang semakin maju dan meningkat sangat berpengaruh terhadap kebutuhan manusia, perkembangan ini ditandai dengan munculnya inovasi yang mempermudah kebutuhan manusia, internet menjadi salah satu teknologi yang sangat diandalkan saat ini dan menjadi faktor yang mempermudah seorang pemimpin memperoleh informasi terbaru. Sistem informasi manajemen merupakan alat yang mampu mengolah informasi dari berbagai sumber. Sistem informasi manajemen adalah sarana penyebaran sebuah informasi yang mampu mencapai seluruh lini dengan syarat penerima informasi mampu untuk mengaksesnya [1].

Pemerintah akan terus berupaya dalam meningkatkan program di segala aspek sebagai sarana untuk menyampaikan informasi secara nyata dan sempurna dalam pelayanannya kepada masyarakat, dengan perkembangan pengetahuan teknologi. Kemendagri dalam upaya meningkatkan program pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang otomatis menggantikan Permendagri sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah untuk

penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif dan cepat pada 14 Oktober 2019. SIPD ini memuat mengenai sistem informasi perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintah daerah lainnya seperti sistem pembinaan dan pengawasan daerah [2]. Dalam penerapan aplikasi berbentuk web ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pemerintahan di Indonesia. SIPD merupakan jembatan penghubung transportasi sistem digitalisasi Indonesia dengan satu data Indonesia namun dalam menjalankan program ini tidaklah mudah karena memerlukan kerjasama dan kerja keras dari setiap *stakeholder* yang terlibat.

SIPD adalah sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, seluruh pemerintah daerah di wilayah Indonesia harus menerapkan sistem penatausahaan yang berbasis teknologi dalam hal ini adalah aplikasi SIPD.

Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pengelolaan keuangan daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 maupun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Uraian tentang penatausahaan keuangan daerah mencakup hal-hal sebagai berikut: (a) asas umum penatausahaan keuangan daerah; (b) pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah; (c) penatausahaan penerimaan; dan (d) penatausahaan pengeluaran.

Kemendagri mengeluarkan Surat Edaran untuk seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia agar menggunakan aplikasi SIPD guna diperoleh satu data keuangan Indonesia. Hal ini ditindaklanjuti dengan keluarnya Pemendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang “Sistem Informasi Pemerintah Daerah” dimana ruang lingkup dari SIPD meliputi: a) informasi pembangunan daerah; b) informasi keuangan daerah; c) informasi pemerintah daerah lainnya. Pada tahun 2019 baru bisa dilaksanakan untuk informasi pembangunan daerah, data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik. Pada tahun 2020, seluruh perangkat daerah di Indonesia sudah diharuskan untuk menggunakan SIPD dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan juga untuk pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi keuangan daerah yang dihasilkan dari tahapan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah yang berbasis elektronik.

Namun, pada awal penerapan SIPD dalam penatausahaan keuangan, tidak semua daerah di Indonesia bisa melaksanakan secara penuh sehingga Kemendagri masih mengizinkan untuk menggunakan aplikasi pendamping lainnya agar tidak terjadi kemacetan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Sama halnya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng yang mencoba untuk menggunakan aplikasi SIPD secara penuh baik melalui perencanaan penganggaran, penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan. Namun pada pertengahan tahun 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng tidak sanggup melanjutkan menggunakan aplikasi SIPD dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan. Hal ini dikarenakan banyak kendala yang dihadapi.

Banyak kendala yang ditemui OPD pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam penggunaan aplikasi SIPD. Kesulitan akses ke server yang masih sering *error*, serta masih banyak perbaikan dan pengembangan dalam pelaksanaan aplikasi SIPD khususnya dalam sistem keuangan daerah bidang penatausahaan. Selain itu, kompetensi yang dimiliki oleh petugas atau operator sistem keuangan daerah bidang penatausahaan dalam menjalankan sistem keuangan daerah bidang penatausahaan juga belum optimal, dimana petugas atau operator yang membidangi sistem keuangan daerah masih melakukan kesalahan-kesalahan di dalam aplikasi SIPD. Selain itu, kendala lainnya adalah kurang adanya sosialisasi dan pembinaan dalam menggunakan aplikasi SIPD serta kurang disediakan layanan *help desk* dari pemerintah apabila terjadi *error*. Oleh karena kendala ini, menjadikan terhambatnya pembayaran belanja pada SKPD dan Informasi pengelolaan keuangan belum semua keluarannya melalui SIPD sebagai salah satu sasaran dari program SIPD.

Namun karena adanya tuntutan dari pemerintah pusat untuk tetap menggunakan SIPD agar terintegrasinya satu data pengelolaan keuangan Indonesia, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng pada tahun 2022 mencoba lagi menerapkan aplikasi SIPD pada penatausahaan sehingga berhasil mendapatkan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan melalui aplikasi SIPD walaupun masih banyak sekali kendala yang ditemui. Tabel berikut mengemukakan bahwa masih banyaknya ditemui kendala dalam penerapan aplikasi SIPD untuk mendukung pelaksanaan penatausahaan keuangan di seluruh Indonesia dan juga termasuk dalam wilayah kabupaten di seluruh Provinsi Bali.

Berdasarkan uraian masalah yang disebutkan di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut: 1) kesulitan akses ke *server* yang masih sering *error* karena masih banyak perbaikan dan pengembangan dalam pelaksanaan aplikasi SIPD khususnya dalam sistem keuangan daerah bidang penatausahaan, 2) sumber daya manusia yang mengelola sistem keuangan daerah bidang penatausahaan ini masih terbatas, 3) kurangnya sosialisasi dan pembinaan dalam menggunakan aplikasi SIPD serta kurang disediakan layanan *help desk* dari pemerintah pusat, dan 4) belum semua informasi keuangan dihasilkan dari sistem elektronik.

KAJIAN LITERATUR

Penilaian efektivitas suatu program perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut atau gambaran keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Maka efektivitas menggambarkan seluruh siklus *input*, proses, dan *output* yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai. Suatu organisasi, program dan kegiatan dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana dan dapat memberikan dampak, hasil atau manfaat yang diinginkan.

Menurut Steers, faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya efektivitas kerja, adalah [3]:

1) Karakteristik Organisasi.

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi. Struktur merupakan cara untuk suatu organisasi menyusun orang-orangnya untuk menciptakan sebuah organisasi yang meliputi jumlah spesialisasi pekerjaan, desentralisasi pengendalian untuk penyelesaian pekerjaan. Teknologi merupakan suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran jadi.

2) Karakteristik Lingkungan.

Lingkungan mencakup dua aspek yang berhubungan yaitu lingkungan intern dan ekstern. Lingkungan intern dikenal dengan iklim organisasi yang meliputi atribut lingkungan kerja seperti kepuasan dan prestasi. Lingkungan ekstern menyangkut kekuatan yang timbul diluar batas organisasi yang mempengaruhi tindakan dalam organisasi seperti adanya peraturan pemerintah.

3) Karakteristik Pekerja.

Pekerja mempunyai pandangan, tujuan, kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda sehingga akan menyebabkan perbedaan perilaku antara orang satu dengan orang lain. Prestasi merupakan modal utama di dalam organisasi yang akan berpengaruh besar terhadap efektivitas, sebab meskipun teknologi yang dipergunakan canggih jika tanpa prestasi tidak ada gunanya.

4) Kebijakan dan Praktek Manajemen.

Manajer memegang peranan sentral dalam keberhasilan suatu organisasi melalui perencanaan, koordinasi dan memperlancar kegiatan. Sehingga manajer berkewajiban menjamin struktur organisasi konsisten dan menguntungkan untuk teknologi dan lingkungan yang ada. Selain itu manajer juga bertanggungjawab untuk menetapkan suatu sistem imbalan yang pantas sehingga dapat memuaskan kebutuhan pekerja dan tujuan pribadinya dalam mengejar sasaran organisasi.

Efektivitas kerja adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan meliputi kuantitas kerja, kualitas kerja, dan ketepatan waktu

dalam menyelesaikan pekerjaan serta kualitas kerja yang baik [4]. Beberapa indikator efektivitas kerja yaitu:

- 1) Kuantitas Kerja
Kuantitas kerja merupakan volume kerja yang dihasilkan dibawah kondisi normal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya beban kerja dan keadaan yang didapat atau dialaminya selama bekerja. Setiap perusahaan selalu berusaha supaya efektifitas kerja dari karyawannya dapat ditingkatkan. Oleh Karena itu, suatu perusahaan selalu berusaha agar setiap karyawannya memiliki moral kerja yang tinggi.
- 2) Kualitas Kerja
Kualitas kerja merupakan sikap yang ditunjukkan oleh karyawan berupa hasil kerja dalam bentuk kerapian, ketelitian, dan keterkaitan hasil dengan tidak mengabaikan volume pekerjaan didalam mengerjakan pekerjaan.
- 3) Pemanfaatan Waktu
Setiap karyawan harus dapat menggunakan waktu seefisien mungkin, terutama dengan cara datang tepat waktu ke kantor dan berusaha untuk menyelesaikan tugas sebaik-baiknya dengan memanfaatkan waktu selama penggunaan masa kerja yang disesuaikan dengan kebijakan perusahaan.
- 4) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Diperlukan guna mewujudkan hasil yang diharapkan oleh setiap perusahaan. Setiap karyawan sudah sepatutnya diarahkan untuk lebih meningkatkan efektivitas kerja mereka melalui berbagai tahapan usaha secara maksimal. Sehingga dengan demikian pemanfaatan sumber daya manusia akan lebih berpotensi dan lebih mendukung keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan.

Terdapat tiga pendekatan yang diperlukan dalam menilai efektivitas [5], yaitu:

- 1) Pendekatan sumber (*resource approach*), yaitu mengukur efektivitas melalui input. Pendekatan mementingkan adanya keberhasilan organisasi guna mendapatkan sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang selaras dengan kebutuhan organisasi.
- 2) Pendekatan proses (*process approach*), yaitu untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
- 3) Pendekatan sasaran (*goals approach*), yaitu dimana pusat perhatian pada *output*, menilai keberhasilan organisasi guna mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana.

Dari sejumlah definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah disebutkan diatas maka penulis sampaikan bahwa dalam penelitian ini penulis menggunakan teori efektivitas yang diungkapkan oleh Martani dan Lubis dengan menggunakan indikator pendekatan diantaranya pendekatan sumber (*resource approach*), pendekatan proses (*process approach*), dan pendekatan sasaran (*goals approach*) karena teori tersebut mampu mengukur efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam upaya mendukung penatausahaan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Pemerintah Kabupaten Buleleng. Adapun pertimbangan memilih lokasi penelitian tersebut adalah karena dari hasil pengamatan awal peneliti beranggapan bahwa tidak tercapainya tujuan SIPD pada Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam mendukung penatausahaan keuangan daerah serta penelitian ini adalah penelitian yang baru di Kabupaten Buleleng yang meneliti penerapan SIPD dalam mendukung pelaksanaan penatausahaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yang berisikan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh informan yang telah ditentukan sebelumnya, mengenai fakta dan permasalahan serta kendala yang dialami serta dirasakan di lapangan sehingga data yang diperoleh adalah data yang akurat bagi penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng, Kepala Bidang Akuntansi & Pelaporan BPKPD Kabupaten Buleleng, Bendahara Pengeluaran SKPD Kabupaten Buleleng, Bendahara Penerimaan SKPD Kabupaten Buleleng, Pejabat

Penatausahaan Keuangan SKPD Kabupaten Buleleng, dan Staf BPKPD Kabupaten Buleleng. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data kualitatif dengan interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang maka perlu verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan.

PEMBAHASAN

SIPD merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadmini-strasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa “pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling berhubungan untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah”. Setiap pemerintahan kabupaten/kota hingga provinsi diharapkan dapat menerapkan sistem informasi ini dalam tata kelola keuangan daerah. Penerapannya bertujuan agar tercapainya tata kelola keuangan secara efisien serta efektif dalam pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta dapat terwujudnya penilaian Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas penyajian laporan keuangan daerah.

SIPD memegang peran penting dalam mendukung ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang mutakhir, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, SIPD juga berperan dalam mendorong sinkronisasi data antara pusat dan daerah untuk mencapai single database nasional. Oleh karena itu, penggunaan SIPD harus dioptimalkan untuk mendukung tercapainya sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah yang efektif dan efisien [6]. SIPD memberikan banyak manfaat dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Buleleng, yaitu memudahkan dalam penginputan data, ketepatan dalam perhitungan, kecepatan pemrosesan data, efisiensi dalam waktu dan biaya, transparansi anggaran, dan mempercepat proses penyusunan laporan keuangan yang digunakan sebagai sarana pengambil keputusan oleh pimpinan. Namun pada kenyataannya, masih ditemukan kendala dalam penerapan sistem informasi tersebut dimana efektivitas penerapan aplikasi SIPD dalam upaya mendukung penatausahaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Buleleng, dilihat dari: a) indikator pendekatan sumber adalah sudah efektif, b) dilihat dari indikator pendekatan proses adalah sudah efektif, dan c) dilihat dari indikator pendekatan sasaran adalah cukup efektif.

Pada indikator pendekatan sumber, penerapan SIPD belum efektif dikarenakan belum adanya sumber daya manusia yang cukup jumlahnya dan memiliki kompetensi yang memadai. Kemampuan dalam menghasilkan laporan keuangan yang efektif, efisien, akurat dan akuntabel adalah salah satunya harus didukung dengan sumber daya manusia, dalam hasil kegiatan yang dilakukan sumber daya manusia telah memenuhi dan sudah sesuai dengan tupoksinya. Sementara itu, dari indikator pendekatan proses, penerapan SIPD belum efektif dikarenakan aplikasi SIPD ini cukup memudahkan dalam penerapan penginputan laporan keuangan dan juga dalam aplikasi SIPD ini, masing-masing *user* sudah memiliki tanggungjawab dan fungsi tersendiri. Terakhir, dari pendekatan sasaran penerapan aplikasi SIPD dalam upaya mendukung penatausahaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Buleleng dilihat dari indikator pendekatan sasaran adalah efektif dikarenakan sudah banyak yang bisa dihasilkan dari SIPD seperti buku kas umum bendahara, laporan pertanggung jawaban fungsional bendahara, Buku Pajak, Buku register SPP, SPM dan SP2D, walaupun ada yang belum bisa dihasilkan dari SIPD seperti buku panjar, buku kendali kegiatan, BKU BUD sudah ada tetapi belum sempurna, SP2D online yang belum terintegrasi dengan bank sehingga masih secara manual dibawa ke bank dan sebagainya.

Efektifitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, efektivitas sebagai konsep yang sangat penting dalam organisasi karena menjadi ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Karenanya, pengukuran efektifitas bukanlah hal yang sederhana mengingat perbedaan

tujuan masing-masing organisasi dan keragaman tujuan organisasi itu sendiri. Ketersediaan sumber daya manusia dalam pengoperasian SIPD mutlak diperlukan. Peran penting dari sumber daya manusia menjadi salah satu tolak ukur untuk mencapai efektivitas penerapan SIPD yang efektif. Selain itu, sarana prasarana dalam sebuah organisasi pemerintahan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam keterkaitannya dengan penerapan SIPD khususnya jaringan internet yang baik.

Dalam hal pendekatan proses mengukur efektifitas dari proses internal atau mekanisme organisasi. Mengukur efektifitas melalui pendekatan proses dalam organisasi pemerintahan merupakan hal yang penting karena dengan adanya pendekatan ini, dapat mengetahui sejauh mana organisasi memahami tugas dan fungsinya, serta dapat memahami proses dari suatu pelayanan yang ada dalam organisasi pemerintahan tersebut. Sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi pemerintahan yang menjalankan fungsinya adalah kepuasan pelanggan baik internal maupun eksternal. Dilihat dari internal organisasi, sasaran dapat tercapai dengan baik sesuai dengan harapan organisasi melalui penerapan SIPD.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Adisi yang menyatakan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD merupakan suatu sistem informasi yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Hasil dari penelitian ini adalah program SIPD pada BPKAD sudah cukup efektif [7].

Penelitian lain yang mendukung penelitian ini adalah penelitian Irwan yang menunjukkan bahwa Kota Tidore Kepulauan telah berhasil melaksanakan instruksi dari Kementrian Dalam Negeri terkait dengan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, meskipun masih terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi tetapi telah ditangani dengan baik sehingga penerapan sistem informasi pemerintahan daerah dapat berjalan dengan cukup baik [8].

Tercapainya tujuan program adalah tujuan yang ingin dicapai sebuah organisasi ataupun pemerintah dalam pelaksanaan suatu program, begitu juga dalam pelaksanaan program SIPD ini yang menginginkan informasi pemerintahan daerah yang lebih profesional, transparansi, inovatif serta pemantauannya dapat dilakukan dari satu aplikasi saja. Namun demikian, penerapan SIPD di Kabupaten Buleleng masih mengalami hambatan-hambatan.

Hambatan-hambatan yang ditemui diantaranya, dilihat dari indikator pendekatan sumber adalah kurang pemahaman sumberdaya manusia utamanya dalam menerapkan alur bisnis dari laporan penatausahaan keuangan. dilihat dari indikator pendekatan proses adalah jaringan internet yang kurang baik dalam menunjang proses penatausahaan keuangan. Dan, dari indikator pendekatan sasaran adalah belum lengkapnya fitur-fitur pada aplikasi SIPD sehingga laporan keuangan masih ada yang dibuat secara manual.

Faktor penghambat yang ditemukan masih terjadi error jaringan, tidak bisa membuat template sehingga penggunaan SIPD pada BPKAD masih menggunakan aplikasi pendamping yang diukur dari indikator pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Penelitian lain yang mendukung penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Wahida yang menyatakan bahwa perubahan sistem, tidak adanya sosialisasi, keterlambatan dalam pengambilan keputusan, dan *human error* [9].

Penerapan SIPD masih perlu diperhatikan terkhusus kepada seluruh pegawai yang mengelola aplikasi karena belum terlalu memahami alur bisnis sistemnya sehingga perlu dilakukan pemahaman lebih lanjut demi peningkatan sumber daya manusia, karena pekerjaan yang ada didalamnya berkaitan dengan keuangan tidak semua orang mudah dan paham mengenai keuangan. Selain itu, dalam proses penginputan laporan keuangan harus didukung dengan sarana dan prasana yang tersedia baik jaringan wifi, komputer dan alat penunjang lainnya sehingga dalam penginputan pelaporan keuangan bisa berjalan lancar dan tidak terhambat.

SIPD merupakan aplikasi terintegrasi satu yang dikembangkan oleh Kemendagri sebagai alat bantu pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Penulis menemukan temuan penting yaitu masih adanya hambatan-hambatan dalam penerapan SIPD. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan saat penerapan aplikasi SIPD dalam upaya mendukung penatausahaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Buleleng, dilihat dari: indikator pendekatan sumber adalah dengan memberikan pembinaan dan bimbingan teknis yang melibatkan Kemendagri sebagai pemilik aplikasi, sehingga SDM itu memiliki pemahaman yang cukup dalam pengelolaan keuangan. Dengan adanya pembinaan dan bimbingan teknis, pegawai bisa memahami dan dapat menerapkan aplikasi SIPD dengan baik. Pada indikator pendekatan proses adalah berkoordinasi dengan Kemendagri, agar bisa menjawab masalah-masalah yang dihadapi dalam penatausahaan keuangan. Koordinasi langsung dengan mendatangi Kemendagri atau datang ke Kemendagri sangatlah efektif namun perlunya biaya dan waktu yang lama dalam menindaklanjuti kesalahan perbaikan data. Sementara itu, dari indikator pendekatan sasaran adalah dengan memberikan masukan kepada Kemendagri untuk melengkapi usulan-usulan daerah dan memunculkan anggaran per sub unit, kartu kendali per rekening belanja, SP2D online, SP2D sign digital, buku panjar, BKU BUD.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wijaya yang menyatakan bahwa bendahara pengeluaran di Kantor Kecamatan Tombaririsudah melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku meskipun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh bendahara pengeluaran dalam melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban serta penyampiannya. Sehubungan dengan hal itu Kantor Kecamatan Tombariri terusberusaha untuk menciptakan “*good governance*” dengan mengikuti berbagai seminar-seminar dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah [10].

KESIMPULAN

Efektivitas penerapan SIPD dalam upaya mendukung penatausahaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Buleleng, dilihat dari: a) indikator pendekatan sumber adalah belum efektif, b) dilihat dari indikator pendekatan proses adalah sudah efektif, dan c) dilihat dari indikator pendekatan sasaran adalah sudah efektif. Hambatan-hambatan penerapan SIPD dalam upaya mendukung penatausahaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Buleleng dilihat dari: a) indikator pendekatan sumber adalah kurang pemahaman sumberdaya manusia utamanya dalam menerapkan alur bisnis dari pelaksanaan penatausahaan keuangan, b) dilihat dari indikator pendekatan proses adalah jaringan internet yang kurang baik dalam menunjang proses penatausahaan keuangan, dan c) dilihat dari indikator pendekatan sasaran adalah belum lengkapnya fitur-fitur pada aplikasi SIPD sehingga laporan keuangan masih ada yang dibuat secara manual. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan saat Penerapan SIPD dalam upaya mendukung penatausahaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Buleleng, dilihat dari: a) indikator pendekatan sumber adalah dengan memberikan pembinaan dan bimbingan teknis yang melibatkan Kemendagri sebagai pemilik aplikasi, sehingga SDM itu memiliki pemahaman yang cukup dalam pengelolaan keuangan, b) indikator pendekatan proses adalah berkoordinasi dengan Kemendagri, agar bisa menjawab masalah-masalah yang dihadapi dalam penatausahaan keuangan, dan c) indikator pendekatan sasaran adalah dengan memberikan masukan kepada Kemendagri untuk melengkapi usulan-usulan daerah untuk menambahkan fitur-fitur yang belum lengkap seperti memunculkan anggaran per sub unit, Kendali per rekening belanja, SP2D online, sign digital untuk SP2D, penyempurnaan BKU BUD.

DAFTAR RUJUKAN

1. Deseverians, R., & Wulandari, S. 2020. Efektivitas Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Volume XII, Edisi Spesial (1) Desember 2020*. <https://ejournal.ipdn.ac.id>.
2. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (*Permendagri*) No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
3. Zuliyati, S. 2005. *Pengaruh Pengembangan Dan Pengawasan Terhadap Efektivitas Kerja Bagian Produksi PT. Tri Cahya Purnama*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
4. Hasibuan, M. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
5. Martani, H., & Lubis, J. 2009. *Pengantar Teori Organisasi*. Bandung: Ghalia Indonesia.
6. Winarno, Kusnadi, A., & Afriliana, N. 2019. Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah di Kabupaten Tangerang. *Prosiding PKM-CSR, Vol. 2 (2019)*, e-ISSN:2655-3570.
7. Adisi, C.A. 2022. Efektivitas Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS) Vol.1, No.3 September 2022*. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i2.581>.
8. Irwan, M.R. 2022. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Bapelitbang Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. *Jurnal IPDN*. <http://publikasiilmiah.umsu.ac.id/index.php/jim/article/view/1120>.
9. Wahida, F., dkk. 2022. Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerahpada Sekretariat Daerah Kota Mataram. *Jurnal Akbis- Vol. 6 No. 1 (2022) April*. <http://jurnal.utu.ac.id/jakbis/article/view/5265/2810>.
10. Wijaya, F.M, dkk. 2022. Analisis Pelaksanaan Sistem Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Di Kantor Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum) Vol. 5 No. 2 Januari-Juni 2022*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/view/40881>.